EDISI KAMIS, 24 JULI 2025

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02 **GOVERNMENT**
Presiden Prabowo: Perwira Remaja TNI-Polri Harapan Rakyat

04 **NUSANTARA**
Menteri Mu'ti Bantah Perundungan Siswa SMPN 3 Doko Blitar Terjadi saat MPLS

10 **LISTSTYLE**
Senam Dagu Rutin, Rahasia Wajah Tirus

RANGKAIAN FAKTA KASUS IJAZAH JOKOWI

1. Jokowi Diperiksa di Polresta Surakarta

- Tiba pukul 10.15 WIB dengan tim hukum.
- Pemeriksaan berlangsung ±3 jam, 45 pertanyaan diajukan.

2. Penyitaan Ijazah Asli

- Ijazah SMA dan S1 disita untuk kepentingan penyidikan.
- Dokumen dibawa langsung oleh Jokowi.

3. Kasus Unggahan Ijazah

- Unggahan dilakukan oleh Dian Sandi (kader PSI).
- Jokowi tegaskan tidak pernah menyuruh siapa pun mengunggah.

4. Pemeriksaan Saksi

- Total saksi: 29 orang dalam 3 hari.
- Termasuk 10 saksi yang diperiksa bersama Jokowi hari ini.

5. Proses Hukum Berlanjut

- Jokowi sebagai pelapor dugaan fitnah & pencemaran nama baik.
- Sudah masuk tahap penyidikan, 5 nama terlapor berkembang.

JOKOWI DIPERIKSA DAN 2 IJAZAH DISITA

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait kasus tudingan ijazah palsu pada Rabu (23/7/2025) kemarin. Namun, pemeriksaan tidak dilakukan di Polda Metro Jaya melainkan di Polresta Surakarta. Pada pemeriksaan ini lebih tepatnya terkait laporan Jokowi sendiri tentang tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya dan merupakan bagian dari proses hukum untuk mengklarifikasi keaslian ijazahnya. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membawa ijazah aslinya dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk diserahkan kepada penyidik. Tapi, penyidik menyita dua ijazah Jokowi, yaitu ijazah SMA dan ijazah S1. Selain itu, Jokowi juga mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik memberikan 45 pertanyaan, di mana yang 35 merupakan pertanyaan lama namun di-review kembali, sedangkan 10 yang lain merupakan pertanyaan baru.

BACA HAL 11...

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Polresta Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025). ANTARA

PRESIDEN PRABOWO: PERWIRA REMAJA TNI-POLRI HARAPAN RAKYAT

Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat perwira kepada delapan perwira remaja penerima Adhi Makayasa dari tiap matra saat Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/7/2025). Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2025 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025). Kepada 2.000 calon perwira remaja resmi dilantik dalam upacara tersebut, Presiden mengatakan bahwa mereka adalah harapan seluruh rakyat.

Sebanyak 2.000 calon perwira remaja tersebut terdiri atas 827 lulusan Akademi Militer (Akmil), 433 lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), 293 lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 447 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol).

"Berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Selamat bertugas perwira remaja TNI Polri 2025. Rakyat negara dan bangsa menanti dharma baktimu," ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa profesi perwira tidak hanya sebuah panggilan, namun menjadi kehormatan besar yang disertai dengan tanggung jawab luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa mereka telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara di harapan seluruh rakyat Indonesia, serta di hadapan Tuhan Maha Besar.

"Saudara-saudara, perwira remaja putra putri terbaik bangsa berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi, saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini," ujar Presiden Prabowo di hadapan mereka.

Kemudian, Presiden juga menekankan bahwa tugas menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa kini berada di pundak para perwira remaja. Kepala Negara mengingatkan bahwa sejarah perjuangan Indonesia dibangun dari darah, keringat, serta air mata, dan bahwa tantangan masa depan tidak akan mudah.

"Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat, ada di pundakmu, diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu pengorbananmu yang terakhir," ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang penjajahan dan eksploitasi. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa harus siap menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa raga.

"Ingat ini adalah warisan yang kau terima. Bangsamu menuntut dari kau pengabdian yang tertinggi dan bila perlu sebagaimana setelah kau sumpah. Bila perlu saudara rela korbankan jiwa dan ragamu agar Indonesia selamat dan Indonesia kuat," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menggambarkan TNI dan Polri sebagai pilar utama negara. Kepala Negara menekankan bahwa keberadaan kedua institusi tersebut bukan sekadar alat negara, melainkan garda terdepan dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

"Jadilah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang. Jadilah polisi rakyat, polisi nasional, polisi pejuang, selalu membela rakyatmu, selalu cintai rakyatmu. Kau adalah anak kandung dari rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, dan keluarga yang telah mendidik dan merelakan putra-putrinya mengabdi sebagai prajurit dan perwira. Presiden juga menekankan pentingnya nilai luhur profesi kemiliteran dan kepolisian.

"Sekali lagi profesi perwira, profesi prajurit, adalah profesi yang mulia. Tapi tidak ringan, selalu di depan memberi contoh dengan gagah, dengan berani, dengan cerdas," tutur Presiden.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan pentingnya integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian pada para perwira remaja. "Para perwira muda TNI dan Polri adalah tulang punggung pertahanan dan keamanan negara di masa depan. Kalian adalah generasi penerus yang akan menentukan wajah TNI dan Polri ke depan," kata Puan.

Puan juga menandaskan bahwa pelantikan ini merupakan awal dari pengabdian sejati kepada bangsa dan negara. Dalam konteks itu, Puan meminta para perwira muda untuk menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin, serta loyalitas.

"Jalankan tugas secara profesional, pegang teguh nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan loyalitas. Jangan pernah lupakan sumpah dan janji yang telah diucapkan hari ini di hadapan Sang Merah Putih," tutur mantan Menko PMK itu.

Tak hanya itu, Puan menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan masa kini dan masa depan yang kian kompleks. Menurutnya, era digital dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru yang memerlukan kemampuan adaptasi dan kecerdasan dalam mengelola informasi.

"Era digital dan disrupsi teknologi membawa tantangan baru. Sehingga keunggulan tempur dan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kecerdasan dalam mengelola informasi," ujar Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti perlunya penguasaan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan, serta kecepatan dalam merespons berbagai ancaman kontemporer seperti serangan siber, disinformasi, kejahatan transnasional, hingga perang kognitif.

"Selain itu juga penting penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan, serta kecepatan dalam merespons ancaman siber, disinformasi, kejahatan transnasional, hingga perang kognitif," tambahnya.

Kemudian, Puan juga menekankan pentingnya karakter humanis dalam menjalankan tugas. Perwira TNI dan Polri, ujarnya, harus bekerja dengan hati, menjadikan tugasnya sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat.

"Jadilah perwira yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas, humanis, dan berjiwa besar. Jangan pernah mengkhianati rakyat dan negara," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan berharap, generasi perwira muda dapat menjaga kehormatan diri dan institusi, serta mampu menjadi pemimpin masa depan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (rls/lut)

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2025 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/7/2025). Foto: BPMI Setpres/Kris

BPI Danantara Tetap dalam Pengawasan DPR

Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN dan Danantara di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (23/7/2025). (KOMPAS)

Komisi VI DPR RI menekankan menegaskan bahwa DPR tetap akan memiliki fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Selain itu juga meminta melakukan pelaporan berkala serta tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dividen.

"**Fungsi** DPR melakukan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khoeron, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN dan Kepala BPI Danantara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya anggapan bahwa Danantara tidak dapat diawasi oleh DPR. Menurutnya, hampir seluruh norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bagian dari lingkup pengawasan parlemen.

"Jadi menurut saya tidak benar kalau kemudian banyak beredar bahwa Danantara tidak bisa diawasi. Itu keliru. Justru sebagian besar norma dalam Undang-Undang ini masuk dalam pengawasan DPR," tegas Herman dalam rapat tersebut.

Disamping itu, Herman juga mencermati penyusunan Rencana Anggaran dan Kinerja Perusahaan (RAKP) Danantara, termasuk 21 program utama yang telah diidentifikasi meskipun belum seluruhnya dilaksanakan. Menurutnya, dalam paparan yang disampaikan pihak pemerintah dalam rapat tersebut sudah secara baik mengidentifikasi masalah-masalah utama yang berpotensi hadir.

Lebih lanjut, legislator dari dapil Jawa Barat VIII ini pun menyatakan dukungan terhadap keberadaan Danantara, namun juga menekankan bahwa keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi perusahaan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

"Kalau ke depan Danantara menunjukkan kinerja baik, tentu itu juga merupakan keberhasilan bersama, termasuk Komisi VI DPR RI. Namun jika muncul banyak persoalan, maka penyempurnaan terhadap undang-undang ini akan menjadi kebutuhan yang harus dibahas kembali," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan agar kedepannya BPI Danantara bisa melakukan pelaporan pelaksanaan RKAP secara berkala kepada DPR dan mendorong sinergi antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan konsisten dan terus menerus.

"Komisi VI DPR RI juga mendorong BPI Danantara dan Kementerian BUMN untuk memberikan perhatian penuh tentang perencanaan dan pelaksanaan RKAP tahun 2025," ujar Andre.

Disamping itu, Komisi VI DPR RI pun menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan rencana kerja melalui uji kelayakan bisnis yang tepat, pengawasan penggunaan dana, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, juga mewanti-wanti BPI Danantara untuk tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dividen. Mufti menandaskan bahwa BPI Dannatara kini telah mengemban tugas pengelolaan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, pengelolaan ini tidak lagi masuk ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan.

"Dividen dari BUMN adalah hak rakyat dan semestinya dicatat dalam APBN serta dibahas bersama DPR. Namun kenyataannya, dividen tersebut tidak lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan melainkan langsung oleh Danantara," ungkap Mufti dalam Raker tersebut.

"Jadi menurut saya tidak benar kalau kemudian banyak beredar bahwa Danantara tidak bisa diawasi. Itu keliru. Justru sebagian besar norma dalam Undang-Undang ini masuk dalam pengawasan DPR,"

HERMAN KHOERON
Anggota Komisi VI DPR RI

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan menilai kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur bahwa seluruh penerimaan negara harus masuk dalam APBN dan dibahas bersama DPR.

Disamping itu, Mufti juga menyoroti dampak hilangnya pemasukan negara akibat kebijakan ini. Ia menyebut, ketika negara kehilangan penerimaan dari dividen BUMN, Kementerian Keuangan terpaksa mencari sumber pendapatan lain, termasuk dengan memperluas basis pajak.

"Akibatnya, rakyat kecil yang jualan online di platform seperti Shopee dan TikTok mulai dipajaki. Ini ironi. Rakyat semakin tertekan sementara ada dana besar yang tidak jelas pertanggungjawabannya," tutur anggota DPR dari dapil Jawa Timur II tersebut.

Terakhir, Mufti juga meminta agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Kementerian BUMN, BPI, dan Danantara segera diperjelas untuk mencegah kebingungan serta potensi saling menyalahkan di kemudian hari.

"Kami mengingatkan agar sejarah tidak dilupakan. Jangan sampai ada kegagalan dalam pengelolaan ini yang nantinya menjadi noda dalam perjalanan keuangan negara," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian BUMN, BPI Danantara, dan PT Danantara Aset Manajemen terkait struktur entitas serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025.

Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menyepakati sejumlah hal yang mencakup struktur entitas serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025. Penjelasan meliputi restrukturisasi dan konsolidasi bisnis di berbagai sektor, termasuk maskapai, baja, asuransi, perhotelan, hingga 22 pengembangan bisnis strategis seperti kendaraan listrik, pangan, hingga farmasi.

Setelah rapat dengan Komisi VI, BPI Danantara menggelar rapat dengan Komisi XI DPR RI yang dilakukan tertutup. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, rapat diputuskan berlangsung tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait strategi bisnis BUMN yang berpotensi mempengaruhi pasar, baik saham maupun investasi.

"Walaupun rapat ini adalah rapat pertama, nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal," ujar Misbakhun saat membuka rapat.

Dia juga mengatakan karena RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) investasi Danantara itu maka dikhawatirkan memengaruhi dan menjadi bahan spekulasi di pasar. Hal itu juga menjadi alasan rapat dilakukan tertutup. (rls,ant/lut)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

MENTERI MU'TI BANTAH PERUNDUNGAN SISWA SMPN 3 DOKO BLITAR TERJADI SAAT MPLS

Salah seorang siswa baru di SMPN 3 Doko, Blitar, Jawa Timur mendapatkan perundungan oleh sekitar 14-20 siswa di sekolahnya. Peristiwa itu diduga terjadi saat Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah 2025. Namun hal itu dibantah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Polres Blitar memberikan pendampingan berupa trauma healing kepada siswa korban perundungan di sebuah SMPN wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dok.Polres Blitar

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerima laporan atas kejadian perundungan di SMPN 3 Doko, Blitar. Menteri Abdul Mu'ti membantah perundungan terjadi saat MPLS Ramah.

"Ini saya tegaskan, jadi tidak dalam rangkaian MPLS," kata Mu'ti dalam acara peringatan Hari Anak Nasional 2025 di SD Islam Ruhama Lab School of Uhamka, Tangerang Selatan, Rabu (23/7/2025).

Ia menjelaskan perundungan tersebut terjadi di luar sekolah. Mu'ti turut prihatin atas kejadian perundungan yang melibatkan siswa."Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus yang terjadi. Saya sudah mendapatkan laporannya peristiwanya sebenarnya terjadi di luar sekolah," ujar dia.

Mu'ti mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan aman bagi anak. Tidak hanya di dalam sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah bahkan ruang digital.

"Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan juga media (sosial) yang aman dan nyaman bagi anak-anak karena mohon maaf, di antara kekerasan juga terjadi di dunia maya kekerasan juga terjadi melalui media virtual," tutur dia.

Peristiwa perundungan siswa baru di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, viral di media sosial. Kejadian tersebut diduga terjadi saat MPLS Ramah 2025. Korban dijemput sejumlah kakak kelas dan dibawa ke area dekat kamar mandi sekolah. Di sana, korban dikerumuni dan dirundung oleh sekitar 14 siswa secara bergantian.

20 Orang Diperiksa

Hingga saat ini, unit PPA Polres Blitar sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi.

Kasi Humas Polres Blitar Ipda Putut Siswahyudi mengatakan 20 orang saksi yang diperiksa itu terdiri dari siswa yang diduga terlibat aksi perundungan dan beberapa guru di sekolah tersebut.

"Berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Blitar, sampai saat ini sudah ada 20 orang saksi yang diperiksa," kata dia, Selasa (22/7/2025).

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Blitar AKP Momon Suwito mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Jumat (18/7/2025) pukul 08.00 WIB saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) berlangsung.

Korban yaitu WV (12) yang merupakan siswa baru kelas 7 di sekolah tersebut. Saat itu, korban dipanggil oleh kakak kelas dan diajak menuju ke belakang kamarandi sekolah. Di situ, sudah ada 20 siswa lain yang telah berkumpul dan mengejek korban dengan melontarkan olok-olokan secara verbal.

Tak menunggu waktu lama, salah satu siswa kelas 8 berinisial NTN memulai aksi kekerasan dengan memukul pipi kiri korban dan menendang bagian perutnya. Aksi tersebut memicu siswa lain ikut melakukan pengeroyokan secara bersama-sama.

"Setelah kejadian, korban sempat kembali ke kelas namun tetap dalam kondisi trauma. Tak lama kemudian, korban kembali diancam oleh pelaku utama agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada guru maupun orang tuanya. Akibat ketakutan, korban sempat merahasiakan kejadian itu hingga akhirnya menceritakan semuanya sepulang sekolah," ungkapnya. (wid,rls,ist/dya)

KPAI Sebut Pola Kekerasan Siswa Sudah Terpetakan

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan telah melakukan koordinasi dengan Polres Blitar terkait kasus perundungan siswa baru saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Komisioner KPAI, Dyah Puspitarini, menyatakan proses hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan dan saat ini telah memasuki tahap penyelidikan.

“Kami sudah koordinasi dengan Polres dan saat ini masih masuk dalam tahap penyelidikan. Sudah ada 14 anak yang dimintai keterangan ya, tapi statusnya masih saksi. Jadi akan dilihat kembali di proses penyelidikan selanjutnya,” ujar Dyah kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Ia menambahkan, perundungan tersebut terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan kakak kelas, bukan hanya sesama angkatan.

Menurutnya, bullying dipicu karena adanya unsur senioritas pada masa tahun ajaran baru terhadap para murid baru.

"Iya (motifnya) karena senioritas," kata dia.

Kasus itu turut juga dilaporkan ke KPAI. Dyah menyebutkan kalau telah ada sejumlah saksi dari murid lain yang telah dimintai keterangan. Kendati berstatus saksi, anak-anak itu juga termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dalam konteks peradilan pidana anak.

Lebih lanjut, Dyah menyebut kalau kasus ity seharusnya menjadi pengingat bersama akan pola kekerasan di lingkungan sekolah yang sudah lama diidentifikasi oleh KPAI. Dyah mengungkapkan kalau momen tahun ajaran baru memang rawan terjadi perundungan antar siswa.

"KPAI sejak dua tahun yang lalu sebenarnya sudah membuat siklus kekerasan fisik pada anak. Itu sebenarnya polanya tiap bulan apa mungkin menjadi bullying dan sebagainya. Termasuk di awal tahun ajaran baru itu marak bullying," ungkapnya.

Dyah menuturkan kalau penyebab bullying pada tahun ajaran baru itu tak lepas dari situasi senioritas bagi para kakak kelas.(wid,rls,ist/dya)

JUMLAH ADUAN KORBAN KEKERASAN (BULLYING) DI SEKOLAH (2016-2020)

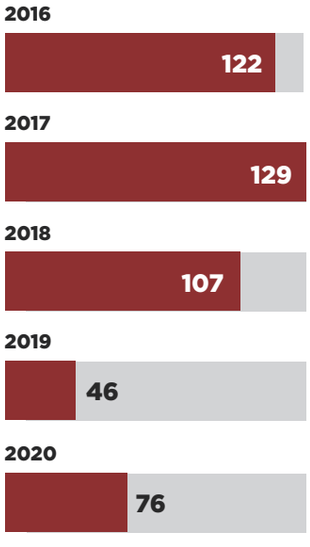

KPK TERUS TELUSURI KORUPSI DANA HIBAH JATIM

5 KADES DAN 1 SWASTA DIPERIKSA DI LAMONGAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri jejak dugaan korupsi dana hubah Jawa Timur (Jatim). Terbaru, 5 orang kepala desa (kades) dan seorang pihak swasta diperiksa di Polres Lamongan, Rabu (23/7/2025).

Gedung Satreskrim Polres Lamongan.Dok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Kabupaten Lamongan. Kali ini, komisi anti rasuah memeriksa sejumlah kepala desa (kades) terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) 2019-2022.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemeriksaan terhadap sejumlah kades dari Lamongan ini dilakukan di Mapolres Lamongan.

Dalam rilisnya KPK KPK membenarkan kembali memeriksa sejumlah kades sebagai saksi. "Hari ini, Rabu (23/7/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim," terang jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Sejumlah saksi yang diperiksa adalah Kepala Desa Menongo Mulyono, Kepala Desa Sukolilo Moh. Lasmiran, Kepala Desa Banjargandang Setiawan Hariyadi, Kepala Desa Gedangan H Sulkan, Kepala Desa Daliwangun Moh. Yusuf, dan Suyitno dari pihak Swasta

Dalam kasus ini, KPK mengungkap menemukan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). KPK menilai pengelolaannya minim transparansi. Total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK, terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

Terpisah, Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M Hamzaid saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan kedatangan penyidik KPK di Mapolres Lamongan.

"Benar saat ini ada pemeriksaan yang dilakukan KPK bertempat di ruang sat Reskrim Polres Lamongan," kata M Hamzaid saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (23/7/2025).

Hanya saja, kata Hamzaid, pihaknya tidak tahu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini terkait apa dan siapa saja yang diperiksa.

"Terkait perkara dan siapa yang diperiksa kami tidak mengetahuinya," ujarnya.

Hamzaid menuturkan, Polres Lamongan hanya menyiapkan tempat berdasarkan permintaan dari KPK. Sampai kapan pemeriksaan berlangsung, Hamzaid juga mengaku tidak mengetahuinya.

"Polres Lamongan hanya menyiapkan tempat berdasarkan permintaan dari KPK," jelasnya.

Terjadi di 8 Kabupaten

KPK pada 20 Juni 2025 mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

Sebelumnya, KPK memperkirakan potensi kerugian negara dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur mencapai angka triliunan rupiah. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

"Didalami kerugian negara, saya senggol-senggol sedikit tadi, sekitar triliunan itu untuk pokir ini," ujar Asep.

Ia menjelaskan, dana dari APBD Provinsi Jatim yang digunakan untuk pengajuan dana pokok pikiran (pokir) oleh kelompok masyarakat ke DPRD mencapai Rp1–2 triliun, dengan estimasi lebih dari 14 ribu titik pengajuan.

"Jadi kalau tidak salah ini ada sekian ribu pokir titik ya sekian ribu, 14 ribu atau berapa gitu. Pokir, nah ini kan jumlahnya, kalau tidak salah tadi juga ada jumlahnya itu sekitar 1 sampai 2 triliun," kata Asep. (wid,rls,ant/dya)

KPK: Skemanya Potensi Ditiru Daerah Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan skema penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur yang saat ini terindikasi dugaan korupsi berpotensi ditiru daerah lain. KPK memandang perlunya perbaikan serius untuk mencegah praktik-praktik korupsi yang serupa.

"Kenapa ini penting? Karena hibah itu, kan, ada di semua daerah. Artinya, potensi korupsi ini bisa terduplikasi di daerah lain," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi mengatakan KPK saat ini tengah menangani kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021-2022 itu dengan serius. KPK, kata Budi, telah mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada kasus tersebut.

"Mulai dari perencanaan, pengusulan, penetapan besaran hibah untuk Pokmas-nya, kemudian penyalurannya, pelaksananya hingga tahapan evaluasi dan pertanggung jawaban dari penggunaan dana hibah tersebut. Semuanya dilakukan identifikasi untuk melihat kerawanan-kerawanan terjadinya korupsi," tutur Budi.

Oleh sebab itu, Budi berharap agar daerah-daerah lain dapat menjadikan kasus ini sebagai contoh nyata dari dampak akibat mekanisme penyaluran dana hibah yang tidak benar. Termasuk, memitigasi agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Terbaru, KPK menemukan 757 rekening dengan identitas yang sama dan kelompok masyarakat (pokmas) fiktif terkait dengan penyaluran dana hibah pokmas dari APBD Pemprov Jawa Timur (Jatim).

Temuan tersebut disebut merupakan hasil deteksi potensi penyimpangan dan rekomendasi perbaikan tata kelola dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh KPK melalui tugas Koordinasi dan Supervisi.

Budi Prasetyo menjelaskan, anggaran hibah Provinsi Jatim pada periode 2023-2025 mencapai Rp12,47 triliun dengan jumlah penerima 20.000 lembaga.

Daftar 21 tersangka kasus suap dana hibah Pokmas Jatim:

1. Anwar Sadad (eks Wakil Ketua DPRD Jatim)
2. Kusnadi (eks Ketua DPRD Jatim)
3. Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim)
4. Bagus Wahyudyono (Staf Sekwan)
5. Moch. Mahrus (Bendahara DPC Gerindra Probolinggo)
6. Hasanuddin (swasta)
7. Mahhud (anggota DPRD)
8. Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang)
9. Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo)
10. Abd. Mottolib (swasta/Ketua DPC Gerindra Sampang)
11. Sukar (Kepala Desa)
12. R.A. Wahid Ruslan (swasta)
13. Ahmad Heriyadi (swasta)
14. Jodi Pradana Putra (swasta)
15. Ahmad Jailani (swasta)
16. Mashudi (swasta)
17. A. Royan (swasta)
18. Wawan Kristiawan (swasta)
19. Ahmad Affandy (swasta)
20. M. Fathullah (swasta)
21. Achmad Yahya M. (guru)

"Dana tersebut dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat," kata Budi dalam keterangan tertulis.(wid,rls,ant/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Target Sekolah Rakyat Kabupaten Malang Meleset: Belum Ada Kabar dari Pusat

MALANG - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Malang yang sebelumnya ditargetkan pada Juni 2025, dipastikan meleset. Hingga akhir Juli ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakui belum mendapat kabar lanjutan dari pemerintah pusat.

"Belum ada kabarnya. Ya, kami kan dapat program memang, ya tetap kami persiapkan persyaratannya," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, Rabu (23/7/2025).

Nurcahyo juga menanggapi pernyataan Bupati Malang, Sanusi, beberapa waktu lalu. Yang sempat menyebut pembangunan SR akan kembali ditargetkan pada September 2025 mendatang. Menurutnya, hal itu memungkinkan sepanjang seluruh persiapan dan administrasi di tingkat daerah telah rampung.

"Kalau memang kesiapannya sudah, ya bisa September itu dibangun," katanya.

Lebih lanjut, definitif Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, ini menjelaskan, sejumlah persyaratan administratif telah disiapkan oleh OPD terkait. Terutama Dinas Sosial yang menjadi leading sector program nasional ini.

Ditegaskannya, lahan yang disiapkan untuk pembangunan SR pun sudah dalam kondisi siap pakai. "Administrasi dari teman-teman OPD sudah disiapkan. Lahan juga sudah siap. Tinggal bangun saja, karena semuanya dari pusat," ucapnya.

Terkait perizinan, Nurcahyo menyebut hal ini akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Ia memastikan, Pemkab Malang akan mendukung seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan SR dapat segera terealisasi, termasuk pendataan calon siswa.

"Kalau (izin) daerah, ya daerah yang mengeluarkan. Kami bantu semuanya untuk realisasi Sekolah Rakyat, termasuk nanti pendataan calon siswa," imbuhnya.

Berbeda dengan Kota Malang dan Kota Batu, hingga saat ini Kabupaten Malang menjadi satu-satunya daerah di Malang Raya yang belum memiliki bangunan fisik untuk pelaksanaan program SR.

Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Malang, Nurcahyo. (Santi/Lentera)

Di Kota Malang, SR telah berjalan dengan dua jenjang pendidikan. Empat rombongan belajar (rombel) jenjang Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) telah menggunakan gedung Poltekom di Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan tiga rombel jenjang SMA beroperasi di gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen.

Sementara itu, di Kota Batu, sebanyak 100 siswa tingkat SMP dari Malang Raya, termasuk dari Kabupaten Malang dan Kota Malang, sudah menempati asrama di PPSPA Bima Sakti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu. Dari total tersebut, 54 siswa berasal dari Kota Batu, sementara sisanya dari dua daerah lainnya.(Santi/Dya)

Pemkot Malang Usulkan Disporapar hingga Dinsos Dipecah

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan rencana pemekaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada DPRD Kota Malang.

Usulan ini mencakup rencana pemecahan beberapa dinas, termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) hingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB).

"Kami sementara mengajukan usulan sekian (dinas baru), tapi nanti yang disetujui berapa, akan dilihat lagi," ujar Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, dikutip pada Rabu (23/7/2025).

Dalam skema usulan tersebut, Ali menyebutkan, Disporapar akan dipecah menjadi tiga OPD terpisah, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) serta Dinas Ekonomi Kreatif. Sementara itu, Dinsos-P3AP2KB direncanakan akan dibagi menjadi dua OPD, yaitu Dinas Sosial dan Dinas P3AP2KB.

Selain dua dinas tersebut, restrukturisasi juga menyasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang diusulkan menjadi Dinas Pendidikan saja. Adapun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) diusulkan untuk dipecah menjadi dua dinas baru, yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Cipta Karya.

Ali menjelaskan, usulan pemekaran OPD telah melalui pencermatan terhadap kebutuhan anggaran operasional dan perhitungan beban kerja di masing-masing dinas. Langkah ini juga disesuaikan dengan target kinerja dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025–2029.

"Jumlah OPD yang disetujui dengan DPRD itu akan relevan dengan kekuatan anggaran kami," katanya.

Ditambahkannya, perubahan struktur OPD ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Malang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Jika disetujui, struktur baru OPD ditargetkan mulai berlaku dan beroperasi per 1 Januari 2026.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Pemkot akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu menyiapkan tahapan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan struktural pada dinas-dinas yang baru dibentuk.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan pihaknya akan mengkaji secara menyeluruh setiap usulan pemekaran dinas. Ia menekankan, perlunya pertimbangan yang matang, terutama terkait kemampuan pembiayaan dan efektivitas kebijakan.

"Dengan adanya pemecahan dinas-dinas, itu secara logika (anggaran belanja pegawai) akan bertambah. Karena dinasnya juga bertambah. Tetapi kami lihat dulu, artinya perbandingan urgensi dan kebermanfaatannya," ujar Amithya.

Menurutnya, keberadaan dinas baru tidak semata-mata diukur dari potensi peningkatan pendapatan daerah. Tetapi juga dari kemampuan dinas tersebut dalam menangani program-program dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

"Tetapi kita juga harus melihat apakah kita mampu melakukan pembiayaan terhadap dinas yang banyak itu. Kalau tidak mampu, daripada kami memaksakan, kan tidak bagus," tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan, ini menegaskan kajian terhadap rencana pemekaran OPD harus dilakukan secara komprehensif. Dengan mengedepankan esensi dan tujuan utama dari reformasi birokrasi, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.(Santi/Dya)

TARIF TRUMP UBAH ARAH DAGANG, JEPANG-FILIPINA CAPAI KESEPAKATAN

Presiden Donald Trump berpidato dalam sebuah pertemuan, Februari 2025. (Foto: Getty Images)

Setelah berbulan-bulan ketidakpastian, kebijakan tarif terbaru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mulai memperlihatkan arah yang lebih jelas bagi perubahan lanskap perdagangan di wilayah dengan industri manufaktur terbesar di dunia.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perjanjian dagang baru dengan Filipina setelah pertemuannya dengan Presiden Ferdinand Marcos di Gedung Putih, Selasa (22/7/2025).

"Kunjungan yang indah, dan kami menyelesaikan Kesepakatan Perdagangan kami, yang mana Filipina akan memasuki PASAR TERBUKA dengan Amerika Serikat, dan NOL Tarif. Filipina akan membayar Tarif 19 persen," tulis Trump di Truth Social, Rabu (23/7/2025).

Sebelumnya, AS telah mengumumkan tarif 20 persen untuk ekspor Filipina, yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

AS mengimpor barang senilai $14 miliar dari Filipina tahun lalu, menurut data Departemen Perdagangan AS. Barang-barang utama yang dikirim dari sana antara lain komputer dan barang elektronik lainnya, makanan olahan, mesin, dan pakaian jadi. Sementara itu, AS mengekspor barang-barang Filipina senilai $9 miliar. Komputer dan barang elektronik lainnya, serta makanan olahan, juga termasuk barang-barang utama yang dikirim AS ke sana.

Sebelum pertemuan bilateral, Menteri Keuangan Filipina Ralph Recto mengatakan bahwa negaranya terbuka untuk memangkas tarif pada barang-barang tertentu dari Amerika hingga nol untuk membujuk Trump agar menurunkan tarif timbal balik dari AS. Recto tidak mengungkapkan produk mana saja yang berpotensi menjadi bagian dari konsesi tersebut, tetapi mengatakan Manila sedang mendorong kemungkinan perjanjian perdagangan bebas dengan AS.

"Filipina akan memasuki pasar terbuka dengan Amerika Serikat, dan tanpa tarif. Filipina akan membayar tarif 19%. Selain itu, kami akan bekerja sama secara militer," tulis Trump di Truth Social setelah bertemu dengan Marcos.

Marcos kemudian mengatakan kepada wartawan di Blair House bahwa Manila mungkin mengizinkan tarif nol pada mobil AS, media Filipina ABS-CBN News melaporkan , tetapi tidak memberikan jadwal lebih lanjut.Kedua negara juga sepakat untuk melanjutkan kerja sama militer, kata Trump.

Filipina, sekutu militer lama AS di kawasan Asia-Pasifik, menampung tentara Amerika dan menyediakan akses ke pangkalan militernya. Kedua negara telah mempertahankan perjanjian pertahanan bersama sejak 1951.

Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak agar kerja sama AS-Filipina tersebut tidak membidik atau merugikan pihak ketiga mana pun.

Dia merujuk pada ketegangan di Laut China Selatan di mana kapal-kapal China dan Filipina telah menyaksikan beberapa pertemuan di perairan kaya mineral yang disengketakan akibat klaim tumpang tindih kedua negara. (cnn, Bloomberg, Deutsche Welle, ist/nei)

Jerman-Prancis Desak Uni Eropa Siapkan Balasan

Kontainer di latar belakang kantor pusat Bank Sentral Eropa di Frankfurt am Main (Foto: Shutterstock)

JERMAN dan Prancis mendorong negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk bersiap melakukan tindakan balasan terhadap tarif Amerika Serikat, kecuali jika Washington bersedia mencapai kompromi. Tekanan dari kedua negara ini mencerminkan sikap Uni Eropa yang semakin tegas menjelang tenggat waktu 1 Agustus untuk mencapai kesepakatan dagang.

Berlin, setelah sebelumnya berupaya keras bernegosiasi dengan pemerintahan Donald Trump untuk mengurangi hambatan ekspor yang ditetapkan oleh presiden AS, kini ingin mengancam dengan tanggapan yang keras, kata orang-orang yang mengetahui pemikirannya.

Negara ini telah bergabung dengan Paris, yang telah lama berupaya memperoleh pengaruh atas Trump dengan menimbulkan kerugian pada bisnis AS melalui bea pembalasan.

Kanselir Jerman Friedrich Merz akan menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Berlin pada hari Rabu (23/7/2025).

"Kita perlu mengubah metode negosiasi kita. Kita harus mampu membalas dan mengajukan opsi apa pun yang akan mengubah keseimbangan negosiasi," ujar Menteri Perindustrian Prancis Marc Ferracci di Berlin pada hari Senin (21/7/2025), menjelang pertemuan dengan mitranya dari Jerman, Katherina Reiche.

Para pejabat senior di Komisi Eropa, yang men-jalankan kebijakan perdagangan, bertemu dengan para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa untuk apa yang disebut "pengakuan" pada hari Selasa (22/7/2025).

Pertanyaan utama- nya adalah apakah blok tersebut harus menyiapkan instrumen anti-paksaan (ACI) — yang disebut bazoka perdagangannya. Ins-trumen yang belum pernah digunakan sebelumnya ini akan memberi Brussel keleluasaan untuk memblokir perusahaan-perusahaan AS dari tender publik, mencabut perlindungan kekayaan intelektual, dan membatasi impor dan ekspor.Jerman dan Prancis mendukung penggunaan ACI, tetapi beberapa negara anggota berhati-hati terhadap respons yang dapat dipicu oleh Trump.

“Ada mayoritas diam yang menentang pemicu ACI,” kata seorang diplomat Uni Eropa.

Diplomat ketiga memperingatkan: "Itu akan menjadi nuklir. Situasinya terlalu cair untuk diukur dengan tingkat kepastian apa pun jika negara-negara anggota mendukungnya."

Komisi hanya akan meneruskannya apabila yakin mendapat dukungan mayoritas tertimbang dari negara anggota.

Namun, beberapa diplomat lain mengatakan surat Trump bulan ini yang mengancam tarif "timbal balik" sebesar 30 persen mulai 1 Agustus telah memperketat perlawanan. Sebelumnya, tarif seharusnya naik menjadi 20 persen dari level 10 persen saat ini mulai Agustus.

“Surat tersebut telah memperkeruh suasana di antara negara-negara anggota,” kata salah seorang.

“Jerman telah berubah 180 derajat dalam beberapa hari,” kata yang lain, seraya menambahkan bahwa sebagian besar negara “menginginkan sesuatu di atas meja untuk mendapatkan pengaruh”. (Financial Times, ist/nei)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

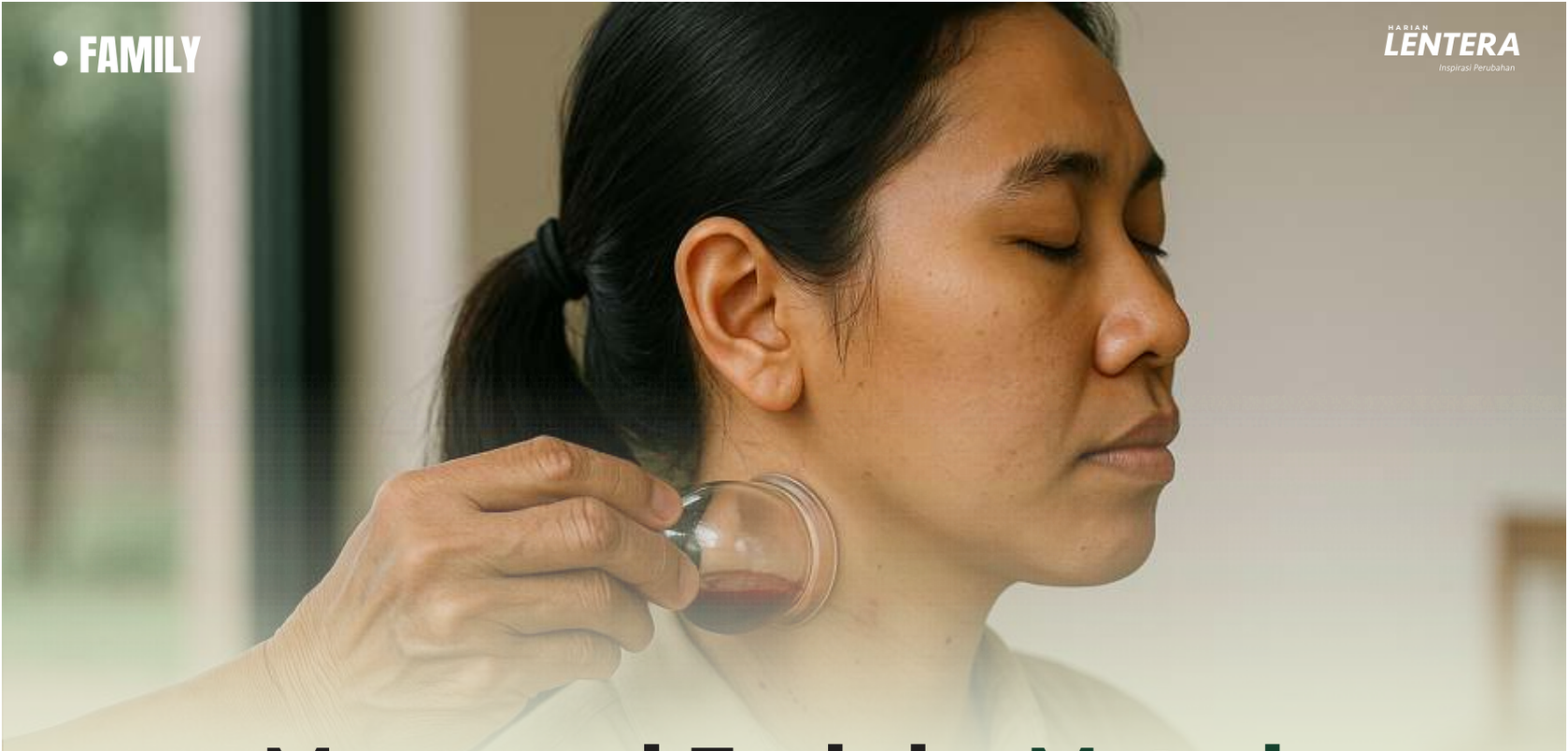

Mengenal Fashdu, Metode Tradisional Detoksifikasi Tubuh

Al-fashdu, atau yang dikenal juga sebagai fashdu, merupakan metode terapi alternatif yang berasal dari praktik pengobatan tradisional dan telah dikenal luas di berbagai budaya, termasuk di tengah masyarakat Muslim.

Dalam dunia medis, metode ini dikenal dengan istilah phlebotomy atau pengeluaran darah terapeutik, yaitu prosedur yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum steril ke pembuluh darah untuk mengeluarkan sejumlah kecil darah dari tubuh. Tujuannya bukan semata-mata membuang darah, tetapi untuk membantu tubuh menyeimbangkan kadar zat tertentu serta mengurangi beban kerja organ dalam.

Menurut laman BKKBN, terapi ini biasanya digunakan sebagai bagian dari upaya preventif (pencegahan) maupun kuratif (pengobatan) terhadap sejumlah gangguan kesehatan. Fashdu dipercaya memiliki potensi dalam memperbaiki kondisi darah, mengurangi penumpukan zat berlebih seperti lemak atau zat besi, serta memperbaiki sirkulasi. Namun, seperti semua bentuk terapi, penting untuk memahami manfaat, risiko, dan batasan dari metode ini.Secara umum, fashdu dipertimbangkan sebagai opsi pendamping dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan metabolisme tubuh dan sistem peredaran darah.

Beberapa kondisi medis yang dapat memperoleh manfaat dari terapi ini antara lain hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sering kali disebabkan oleh sumbatan atau penumpukan dalam pembuluh darah; diabetes tipe 2, khususnya pada pasien dengan resistensi insulin atau peredaran darah yang buruk; serta kadar kolesterol tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.

Terapi ini juga bermanfaat bagi penderita asam urat (gout) atau tingginya kadar asam urat dalam darah, kelebihan zat besi dalam tubuh seperti pada kondisi hemochromatosis, serta penyakit jantung dan risiko stroke, terutama pada pasien yang telah atau sedang menjalani terapi pengencer darah.

Selain itu, penderita penyakit hati berlemak non-alkoholik (NAFLD), yang semakin umum akibat sindrom metabolik, juga dapat merasakan manfaat dari terapi ini.

Pertimbangan Sebelum Menjalani Fashdu

Meskipun terapi ini memiliki sejumlah manfaat, menurut situs ericaresg, tidak semua orang disarankan untuk menjalani al-fashdu.

Ada beberapa kondisi medis yang menjadi kontraindikasi, yaitu keadaan yang membuat prosedur ini tidak aman atau tidak direkomendasikan, antara lain pasien dengan kadar hemoglobin rendah atau anemia, mereka yang baru melakukan donor darah dalam waktu dekat, wanita yang sedang dalam masa kehamilan.

Selain itu, penting bagi seseorang yang ingin menjalani al-fashdu untuk memberitahukan riwayat kesehatan tertentu kepada terapis, seperti riwayat pingsan saat pengambilan darah, konsumsi rutin obat pengencer darah, adanya penyakit menular seperti hepatitis atau HIV/AIDS, keterbukaan mengenai kondisi medis pribadi sangat diperlukan agar prosedur dapat dilakukan dengan aman dan sesuai kebutuhan tubuh.

Cara Kerja dan Manfaat Fashdu

Fashdu bekerja dengan cara mengeluarkan darah yang dianggap mengandung sisa metabolisme, zat berlebih, atau unsur-unsur yang dapat memicu inflamasi jika dibiarkan menumpuk. Berikut beberapa manfaat yang umumnya dikaitkan dengan terapi ini:

Mendukung Proses Detoksifikasi Tubuh

Seiring waktu, tubuh dapat mengalami penumpukan zat sisa atau racun metabolik. Melalui al-fashdu, sebagian dari zat tersebut dikeluarkan bersama darah, membantu tubuh mengurangi beban kerja hati dan ginjal, serta memungkinkan organ-organ penting bekerja lebih optimal.

Meningkatkan Kualitas dan Sirkulasi Darah

Faktor gaya hidup seperti konsumsi makanan tinggi gula, paparan radiasi, dan kebiasaan merokok dapat membuat darah menjadi lebih kental (hiperkoagulasi), memperlambat aliran dan meningkatkan risiko penggumpalan. Al-fashdu dapat membantu melancarkan sirkulasi dengan mengurangi kekentalan darah dan membuang sebagian darah yang sudah tidak optimal fungsinya.

Mengurangi Beban Kerja Limpa

Sel darah merah memiliki masa hidup sekitar 120 hari. Setelah itu, mereka akan dibersihkan oleh limpa. Dengan mengeluarkan sebagian darah melalui al-fashdu, tubuh mendapat kesempatan untuk memproduksi sel darah merah baru yang lebih sehat, dan memberi waktu bagi limpa untuk bekerja secara lebih efisien.

Menurunkan Kelebihan Zat Besi

Kadar zat besi yang terlalu tinggi bisa menimbulkan gejala seperti kelelahan dan lemah jantung. Dalam kasus ekstrem seperti hemochromatosis, zat besi yang berlebih bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Al-fashdu membantu mengurangi kadar zat besi dalam darah, sehingga pembuluh darah lebih bebas dan risiko komplikasi bisa ditekan.

Menunjang Penyakit Hati Berlemak

NAFLD, atau penyakit hati berlemak atau fatty liver non-alkoholik, merupakan kondisi yang banyak terjadi akibat gangguan metabolisme seperti diabetes dan obesitas, yang jika tidak ditangani dapat berkembang menjadi masalah hati yang lebih serius. Penumpukan lemak dan zat besi di hati bisa memperparah kondisi ini dan mengganggu fungsi organ secara keseluruhan. Dengan metode al-fashdu, kelebihan zat besi dalam tubuh dapat dikurangi secara alami, sehingga membantu menjaga fungsi hati tetap optimal dan mencegah kerusakan lebih lanjut. (nei,ist/dya)

Fenomena Aneh di Yellowstone, Muncul Lubang Berisi Air Biru Susu

Kolam air panas baru muncul sekitar awal tahun 2025. Foto: USGS/Mike Poland

Saat para ahli geologi dari Taman Nasional Yellowstone melakukan kunjungan ke Norris Geyser Basin pada April 2025, mereka mendapati pemandangan yang tidak biasa—sebuah lubang yang dipenuhi air berwarna biru susu.

Kunjungan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa alat pencatat suhu, pekerjaan rutin yang mereka lakukan setiap tahun. Namun kali ini, petugas disambut oleh pemandangan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya, yakni lubang menganga dengan lebar 4 meter berisi air berwarna biru susu. Di balik tercipta lubang tersebut, ternyata menyimpan cerita yang cukup mencengangkan.

Lubang air biru susu terletak di ujung barat laut sebuah area yang dikenal secara informal sebagai "Tree Island". Dulu, lokasi itu hanyalah tanah datar biasa. Kini, sebuah kolam panas baru berdiri di sana, lengkap dengan batu-batu berdiameter sekitar 30 sentimeter yang berserakan di sekitarnya. Batu-batu itu dilapisi lumpur abu-abu terang yang warnanya sama persis dengan dinding kolam baru yang masih muda tersebut.

Semua ini menjadi petunjuk jelas bahwa telah terjadi sebuah ledakan hidrotermal di lokasi tersebut. Fenomena ini memicu perhatian para peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut dan memastikan waktu terjadinya ledakan. Untuk itu, mereka memanfaatkan citra satelit guna menelusuri perubahan yang terjadi di area tersebut dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil pengamatan citra satelit, pada Desember 2024 area itu masih terlihat datar dan tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Tidak ada indikasi awal yang menonjol bahwa akan terjadi perubahan geologis besar di wilayah tersebut.

Namun, pada 6 Januari 2025, mulai terlihat lubang kecil yang terbentuk di lokasi itu. Seiring waktu, lubang tersebut berkembang menjadi sebuah kolam berisi air panas yang telah terbentuk sepenuhnya pada 13 Februari 2025. Perubahan ini memperkuat dugaan bahwa ledakan hidrotermal memang telah terjadi di rentang waktu tersebut.

Namun yang aneh, tidak ada alat pendeteksi aktivitas hidrotermal Yellowstone yang menangkap sinyal adanya ledakan besar yang bisa menciptakan kolam ini dalam satu hentakan.

"Jelas, fitur termal baru ini tidak terbentuk dari satu ledakan besar," tulis Michael Poland, geofisikawan dari USGS, bersama Jeff Hungerford, ahli geologi Yellowstone National Park.

"Sebaliknya, kemungkinan besar fitur ini terbentuk melalui serangkaian peristiwa kecil yang awalnya melemparkan batu, lalu menyemburkan lumpur silika dalam jarak pendek, hingga akhirnya membentuk lubang kecil yang kemudian terisi oleh air kaya silika," lanjut mereka.

Meski terdengar mengkhawatirkan, ini justru bisa jadi kabar baik. Yellowstone dikenal sebagai salah satu supervolcano paling aktif di dunia, dan itulah alasan mengapa aktivitas panas buminya selalu dipantau ketat.

Ledakan besar bisa berdampak luas, tapi lubang baru ini memberi sinyal bahwa Yellowstone masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas eksplosif besar dalam waktu dekat. (nei,ist/dya)

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** GATOT SUNARKO **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I TRENGGALEK:** TINA W **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Senam Dagu Rutin Rahasia Wajah Tirus

Lemak yang menumpuk di area dagu sering kali membuat penampilan kurang maksimal dan dapat mengurangi rasa percaya diri. Untungnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi lemak di dagu. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, wajah pun bisa terlihat lebih tirus dan penampilan menjadi lebih menarik.

Lemak di dagu dapat menumpuk karena proses penuaan, kelebihan berat badan, atau kebiasaan buruk, misalnya menggigit sedotan yang bisa mendorong tulang rahang dan membuat kulit serta jaringan lemak di bawahnya berlipat.

Dagu berlipat atau disebut juga double chin sebenarnya bukan hal yang harus dikhawatirkan. Namun, orang yang memilikinya kerap merasa terganggu karena wajah menjadi tampak lebih tua dan terlihat gemuk sehingga berdampak pada penampilan.Nah, agar tampak tirus, ada berbagai cara menghilangkan lemak di dagu, khususnya untuk pemilik lipatan di bawah dagu.

Berikut ini adalah berbagai cara menghilangkan lemak dagu yang dapat Anda lakukan:

Senam Dagu

Gerakan senam di area dagu bermanfaat untuk melatih otot sekitar dagu sekaligus membantu menghilangkan lemak di area tersebut. Senam dagu ini dapat dilakukan dengan cara mendongakkan kepala ke atas, lalu mendorong rahang ke depan hingga terasa regangan otot di sekitar dagu. Tahan posisi ini selama 10 hitungan, kemudian kembali ke posisi semula dengan kepala menghadap ke depan. Lakukan gerakan ini secara berulang beberapa kali untuk hasil yang maksimal.

Selain metode sebelumnya, terdapat pula variasi senam dagu lain yang bisa Anda coba. Caranya adalah dengan menghadap lurus ke depan, lalu julurkan lidah sejauh mungkin dan arahkan ke atas seolah ingin menyentuh hidung. Tahan posisi ini selama 10 detik, kemudian lepaskan. Ulangi gerakan ini beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Diet Sehat

Salah satu cara sederhana untuk menghilangkan lemak di dagu adalah menurunkan berat badan. Penyebab paling umum penumpukan lemak di dagu, yaitu kelebihan berat badan, sehingga dengan menurunkan berat badan akan mengurangi lemak di tubuh secara umum, termasuk dagu.

Secara tidak langsung, cara ini bisa membuat wajah terlihat lebih tirus. Anda dapat melakukannya dengan menjaga asupan kalori harian dan mengonsumsi makanan gizi seimbang.

Olahraga Rutin

Olahraga secara rutin dapat menurunkan berat badan, sehingga dapat menghilangkan lemak, termasuk di dagu. Luangkan waktu minimal 30 menit untuk berolahraga setiap harinya. Namun, sesuaikan jenis olahraga dengan kondisi medis yang dialami dan bila perlu konsultasikan ke dokter lebih dulu.

Pada dasarnya, semua jenis olahraga baik untuk tubuh. Beberapa di antaranya memang lebih banyak membakar lemak di tubuh, khususnya olahraga jenis aerobik, seperti zumba, bersepeda, dan joging.

Suntik Botox

Suntik botox juga bisa menjadi cara menghilangkan lemak di dagu. Selain itu, cara ini juga dapat menghilangkan kerutan dan memperbaiki bentuk wajah yang kerap menurunkan rasa percaya diri.Botox diberikan melalui suntikan ke kulit di daerah tertentu, misalnya dagu. Zat di dalamnya bekerja dengan menghambat aktivitas saraf dan otot yang menegang, sehingga tampilan keriput dan kulit kendur pun berkurang.

Suntik botox biasanya bertahan selama 3–6 bulan. Jadi, prosedur ini harus dilakukan berulang kali untuk mempertahankan tekstur kulit dan bentuk wajah.

Sedot Lemak

Sedot lemak merupakan prosedur umum untuk menghilangkan lemak di dagu. Prosedur ini dilakukan dengan membuat sayatan kecil untuk memasukkan tabung kecil guna menyedot lemak di area dagu.Pada prosedur ini, dokter biasanya akan membentuk serta menyesuaikan proporsi dagu dan leher untuk membentuk kembali garis rahang agar terlihat lebih seimbang dan tirus.

Tanam Benang

Tanam benang merupakan salah satu cara instan untuk menghilangkan lemak di dagu. Prosedur ini dilakukan oleh dokter kulit atau dokter kecantikan yang sudah terlatih.Cara kerjanya adalah dengan memasukkan benang khusus ke kulit sekitar dagu, lalu dokter akan menarik dan mengencangkan benang tersebut sehingga dagu tampak maju dan lipatan lemak di bawahnya tersamarkan.Selain membuat tampilan wajah yang lebih tirus, prosedur ini mampu membentuk wajah dan mengencangkan kulit di area dagu.

Facelift

Cara selanjutnya adalah facelift. Prosedur ini dilakukan dengan menghilangkan atau memindahkan kulit dan jaringan lemak berlebih di bagian tertentu, termasuk dagu. Prosedur facelift juga digunakan untuk mengurangi lipatan kulit di bawah mata.

Operasi Pengencangan Kulit Leher

Terdapat beberapa jenis operasi pengencangan kulit leher, yaitu cervicoplasty dan platysmaplasty. Prosedur cervicoplasty dilakukan untuk menghilangkan kulit kendur dan jaringan lemak di dagu.Sementara itu, platysmaplasty juga bisa mengencangkan otot leher walaupun tidak secara langsung membuang jaringan lemak di bawah dagu. Operasi ini dapat memperkecil bentuk leher dan dagu, sehingga wajah terlihat lebih kurus.

Untuk memperbaiki penampilan wajah dan bentuk dagu, metode lain seperti filler dagu juga bisa dicoba.Selain berbagai cara menghilangkan lemak di dagu di atas, pemakaian baju berkerah tinggi (turtle neck) juga bisa menutupi penumpukan lemak di dagu dan sekitarnya.Namun, bagaimanapun tampilan atau bentuk tubuh Anda, kuncinya adalah menerima seutuhnya dan percaya diri. (nei,ist/dya)

Jokowi Diperiksa (dari Hal 1) ...

Jokowi tiba di Polresta Surakarta pada pukul 10.15 WIB bersama dengan tim kuasa hukumnya. Mereka langsung langsung ke ruang pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksono, kepada para wartawan yang telah menunggu di Polresta Surakarta, kedatangan Jokowi juga membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM.

Firmanto mengatakan ijazah tersebut akan diserahkan dan disampaikan ke penyidik. "Bapak (Jokowi) secara konsisten akan mengikuti kasus hukum dan menghargai semua proses yang terjadi dan hari ini bisa dilihat penjadwalan Bapak untuk dimintai keterangan dilakukan di Polresta Surakarta," katanya.

Firmanto menandaskan bahwa sejak awal Jokowi konsisten dan berkomitmen mengikuti proses hukum kasus tudingan ijazah palsu tersebut.

Dia juga mengatakan, penyidik juga memanggil sembilan saksi ke Polresta Surakarta di hari yang sama. Sebelumnya, lanjut Firmanto, penyidik sudah memeriksa delapan saksi pada Senin (21/7/2025). Kemudian pada Selasa (22/7/2025) kembali memeriksa 10 saksi.

Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 3 jam, Jokowi akhirnya keluar ruangan dan memberikan keterangan pada wartawan. Dia mengatakan bahwa penyidik sudah melakukan penyitaan untuk ijazah S1 dan SMA. Terkait dengan hal itu, ia mengatakan akan tetap menghormati dan mengikuti proses hukum yang berjalan.

Jokowi juga menjelaskan jika dalam pemeriksaan tersebut, ia menerima sebanyak 45 pertanyaan dari penyidik. Ia mengatakan, dari 45 tersebut, 35 di antaranya merupakan pertanyaan yang lalu namun di-review kembali. Sedangkan sepuluh yang lain merupakan pertanyaan baru. "Saya jawab sesuai dengan yang saya tahu dan apa yang terjadi," katanya usai pemeriksaan di Mako 2 Polresta Surakarta.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan ragam pertanyaan yang diajukan penyidik padanya. Di antara pertanyaan tersebut adalah ada yang berkaitan dengan pengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial. Unggahan tersebut dilakukan oleh Dian Sandi, kader PSI, di akun X miliknya pada 1 April 2025.

Penyidik menanyakan apakah Jokowi kenal dan kapan bertemu dengan Dian Sandi. Pertanyaan lain yang diajukan adalah apakah Jokowi meminta Dian Sandi untuk memposting ijazahnya di media sosial.

"Semua saya jawab, saya bertemu di rumah saya waktu mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah mem-posting ijazah saya," katanya.

Lebih tegas lagi, Jokowi mengatakan kalau dirinya tidak memerintahkan siapapun untuk mengunggah ijazah tersebut di media sosial.

Selain pertanyaan terkait dengan postingan ijazah, penyidik juga melontarkan pertanyaan terkait salah satu dosennya Ir Kasmudjo MS saat Jokowi masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kepada tim penyidik Jokowi menjelaskan tentang siapa dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsinya

"Beliau dosen pembimbing saya, tapi dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmudjo tapi Prof DR Ir Ahmad Sumitro, untuk lebih memperjelas saja," katanya.

Terkait hal itu, kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan penyitaan ijazah asli tersebut dalam rangka pembuktian dan penyidikan.

"Kami sangat welcome, dari awal kami melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya, kami sudah mengatakan kami siap, dan kami sangat welcome karena itu dalam rangka pemenuhan dan investigasi penyidikan," katanya.

"Ini sejalan dan konsisten dengan yang kami sampaikan. Nanti di persidangan akan ditunjukkan. Untuk sekarang bersabarlah, terutama untuk orang-orang yang minta agar ditunjukkan. Karena ini sudah disita artinya sudah resmi akan ditunjukkan ke persidangan nantinya," katanya.

Usai pemeriksaan kedua hari ini, Jokowi mengaku akan tetap mengikuti dan menghormati proses hukum yang berjalan. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan penyitaan ijazah asli S1 dan SMA miliknya.

"Tadi juga bersama sama ya dengan saksi saksi yang lain, ada 11, 10 plus saya berarti 11. Yaa kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati, sampai nanti di pengadilan kita lihat ya," pungkasnya.

Mengenai munculnya sejumlah nama terlapor yang beredar saat ini, ia mengatakan hal itu bagian dari proses penyelidikan, Firmanto mengatakan jika Jokowi hanya mengajukan pengaduan, karena merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan membawa dokumen-dokumen terkait lainnya. Dia mengatakan, dalam proses penyelidikan ditemukan fakta dan nama-nama yang beredar saat ini.

Ia mengatakan dari proses penyelidikan naik ke penyidikan dan didapati ada proses pidana. "Kita cermati saja karena dari proses pengaduan yang disampaikan, kita ada lima nama dalam proses lidik itu. Kemudian berkembang ada laporan lain yang digabungkan dalam satu perintah penyidikan, kita tunggu saja. Siapa melakukan apa dan akan mempertanggung-jawabkan secara hukum," kata Firmanto. (ant,ist/lut)

TPUA : Jokowi Dapat Perlakuan Spesial

TERKAIT dengan langkah Polda Metro Jaya memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Polresta Surakarta terkait kasus tudingan ijazah palsu, Kuasa hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Ahmad Khozinudin menyebut kepolisian telah memberikan perlakuan spesial kepada Jokowi.

Pernyataan tersebut karena saksi lainnya diperiksa di Polda Metro Jaya. "Jokowi diberikan fasilitas diperiksa di Solo. Jadi, Jokowi seperti mendapatkan fasilitas spesial dari polisi," kata Ahmad kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Ahmad juga menyinggung soal pernyataan Polda Metro Jaya saat Roy Suryo cs tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. Dia mengatakan saat Roy Suryo dan terlapor lainnya tidak menghadiri undangan klarifikasi, yang sifatnya tidak wajib, Humas Polda memframing tidak memenuhi panggilan dan mangkir. Namun, lanjutnya, ketika Jokowi tidak memenuhi panggilan polisi, tidak ada keterangan dari humas Polda.

"Jika sudah demikian, kami ragu ada keadilan dalam proses ini. Karena polisi, bertindak tidak imparsial. Tidak equal," imbuhnya.

Tak hanya itu, Ahmad mempertanyakan ketidak hadiran Jokowi dalam pemeriksaan sebagai pelapor yang dijadwalkan oleh Subdit Kamneg di tahap penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis (17/7/2025) pekan lalu. Saat itu, ada permintaan penundaan dengan alasan kesehatan. Akan tetapi, Jokowi diketahui hadir dan memberikan pidato dalam Kongres PSI 2025 di Graha Saba Buana, Solo pada Sabtu (19/7/2025).

"Dipanggil Polda sebagai saksi korban di tingkat penyidikan tidak datang alasan sakit, tapi malah hadir di Kongres PSI. Sekarang, dipanggil Polda tidak hadir di Polda Metro Jaya, malah penyidik Polda yang akan datang ke Solo. Ini kan sama saja, polisi di bawah kendali Jokowi?" ucap Ahmad.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana mengatakan pemeriksaan di kota asal Jokowi itu bukan hal istimewa. Sebab, Jokowi diperiksa di Solo karena saat ini Penyidik Polda Metro Jaya sedang berada di Solo. "Yang pasti di hari Senin kami mendengar penyidikan dilakukan di Polres Solo itu ada delapan saksi," kata dia.

Di satu sisi, terkait dengan laporan Jokowi atas ijazah palsu itu, Mantan Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan dirinya tak takut masuk penjara. Hal itu setelah namanya terseret sebagai terlapor bersama 11 orang lain dalam kasus ijazah Jokowi.

Abraham menegaskan dia akan mendukung para terlapor, bahkan rela masuk penjara dalam kasus ijazah ini. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Deklarasi Perjuangan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

"Kita harus dukung sampai kapanpun juga, kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara. Bebaskan 11 orang ini," kata Abraham.

Lebih lanjut, Abraham Samad mengatakan dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan bentuk teror kepada para terlapor agar berhenti melakukan investigasi terhadap keaslian ijazah Jokowi.

Karena itu, ia meminta agar para terlapor tak perlu khawatir dengan dikeluarkannya SPDP oleh Polda Metro Jaya. "Saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk untuk ingin menteror," katanya.

"Karena kalau anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa SPDP hanyalah bagian kecil dari proses yang akan dilalui. Sebab yang paling penting adalah semangat perjuangan untuk terus melakukan investigasi terhadap ijazah Jokowi. (ist/lut)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Peruba

BNPB menunjukkan puluhan tersangka kebakaran hutan dan lahar di Riau. (BNPB)

44 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Riau

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau menyeret 44 orang sebagai tersangka, mereka diduga secara sengaja membakar lahan mineral dan gambut di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Juli 2025. Penetapan tersangka itu disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan secara konsisten melalui Satgas Penegakan Hukum. "Sampai saat ini sudah ada 35 kejadian karhutla yang diproses hukum, dengan 44 tersangka. Ini langkah nyata agar memberi efek jera dan mencegah masyarakat membuka lahan dengan membakar," kata dia keterangan di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Suharyanto juga menyebutkan bahwa sebagian besar kejadian karhutla di Riau bukan karena faktor alam semata. Dengan adanya penetapan tersangka tersebut maka menunjukkan adanya ulah manusia yang mengakibatkan karhutla. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan, untuk kepentingan pembukaan area tanam.

Dalam rapat koordinasi Penanganan Karhutla di Kota Pekanbaru, Riau, dia juga menekankan bahwa penegakan hukum akan terus diperkuat dan pelaku, baik individu maupun korporasi, akan dikenai sanksi berat jika terbukti melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan.

"Bukan karena cuaca atau kekeringan, tapi karena memang dibakar. Kami sudah bertahun-tahun menangani ini dan polanya selalu sama. Ini harus dihentikan," ujarnya.

Suharyanto meminta masyarakat untuk aktif dalam pencegahan, dengan cara melaporkan segala indikasi atau aktivitas mencurigakan yang mengarah pada pembakaran lahan kepada aparat setempat.

"Segera lapor ke TNI, Polri atau aparat desa jika melihat ada yang membakar. Jangan dibiarkan, karena dampaknya bisa meluas dan membahayakan semua," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan data kebakaran di Riau tercatat 790 titik panas terdeteksi dengan 27 titik api aktif atau meningkat tajam dengan luas lahan terbakar melonjak dari 546 hektare menjadi hampir 1.000 hektare hanya dalam 24 jam terakhir.

"Sebaran titik api terkonsentrasi dan saling berdekatan, yang menunjukkan adanya pola pembakaran berulang dan terorganisasi," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.

Di satu sisi, Provinsi Riau resmi meningkatkan status dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Peningkatan status ini dilakukan menyusul meluasnya kasus kebakaran hutan dan lahan yang kini mencakup wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil).

"Kita sudah mendapatkan arahan dari BNPB untuk menetapkan status Tanggap Darurat karena karhutla terjadi signifikan dalam beberapa hari belakangan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edy Afrizal, Selasa (22/7/2025).

Edy mengatakan dengan menaikkan status menjadi Tanggap Darurat Karhutla ini, Riau akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mengatasi Karhutla.

"Bukan karena cuaca atau kekeringan, tapi karena memang dibakar. Kami sudah bertahun-tahun menangani ini dan polanya selalu sama. Ini harus dihentikan. Segera lapor ke TNI, Polri atau aparat desa jika melihat ada yang membakar. Jangan dibiarkan, karena dampaknya bisa meluas dan membahayakan semua,"

SUHARYANTO
Kepala BNPB

Sebab yang terjadi di lapangan, Edy menerangkan selain cuaca panas karena musim kemarau, petugas di lapangan juga kesulitan memadamkan api lantaran angin yang berembus kencang dan sulitnya sumber air.

"Yang parah dengan kabut asap parah kemarin, di Rohil. Semua tim turun ke lapangan. Petugas sempat kewalahan karena angin kencang dan cepat juga menjalar ke lokasi lain kebakaran," tuturnya.

Karhutla bukan hanya terjadi di Kabupaten Rohul dan Rohil saja. Melainkan Karhutla juga terjadi di Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Kota Dumai.

Untuk mempercepat pemadaman api, BPBD Riau mendapatkan bantuan dua unit helikopter water boombing dan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

"OMC sudah dilakukan untuk memicu terjadinya hujan, mudah-mudahan hari ini turun hujan," katanya.

900 Hektare Lahan Terbakar

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Dr. Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan hampir 900 hektare lahan telah terbakar di Riau.

Hanif menerangkan dari 13,4 juta hektare gambut nasional, lahan gambut di Riau mencapai 4,9 juta hektare atau lebih dari separuh total luas daratannya. Sehingga hal ini menjadikan Riau sebagai wilayah yang sangat rawan terjadinya Karhutla.

"Kondisi ini diperparah oleh kegiatan pengeringan lahan gambut untuk perkebunan sawit. Meski hujan masih turun di beberapa wilayah, namun kondisi gambut yang kering tetap menyimpan potensi kebakaran besar," katanya saat rapat koordinasi bersama Gubernur Riau, Kapolda, dan Kepala BNPB, Selasa (22/7/2025).

Kendati pemerintah menurunkan tiga pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memancing terjadinya hujan, Menteri Hanif menegaskan pasukan yang bergerak di darat adalah ujung tombak untuk mengatasi Karhutla di lahan gambut.

"Lahan gambut tidak bisa ditangani dengan water bombing saja. Pasukan darat harus diperkuat, termasuk melalui koordinasi lintas sektor oleh Pemprov, TNI-Polri, BNPB, dan masyarakat," jelasnya.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 yang masih berlaku hingga kini, Hanif menegaskan seluruh pihak diminta bersinergi dalam upaya pencegahan, penanggulangan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi.

Hanif juga meminta Kapolda Riau tidak ragu menindak para pelaku pembakaran, baik disengaja maupun tidak. Bahkan, korporasi pemegang konsesi juga akan dikenai sanksi pidana, perdata, hingga administratif.

"Kami tegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang menyebabkan kebakaran. Pelanggaran akan diproses sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Hanif.

Hanif juga menyebut, pemerintah akan menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

"Seperti yang sudah inkrah sebelumnya, ganti rugi bisa mencapai triliunan rupiah bagi korporasi yang terbukti lalai," ucapnya. (ant,nes,ist/lut)